



**THE EFFECT OF EXECUTIVE COMMISSIONERS, COMPANY SIZE,
INDEPENDENT COMMISSIONERS, AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP
ON TAX AVOIDANCE IN LQ45 COMPANIES LISTED ON THE IDX**

2017-2019 PERIOD

Aviva Cahya Ningrum

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum,
Dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Nurasik

²⁾Dosen Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: nurasiknurasik73@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of executive commissioners, company size, independent commissioners, and institutional ownership on tax avoidance in LQ45 companies listed on the IDX for the 2017-2019 period. The sampling method used was purposive sampling method. The number of companies sampled in this study were 29 LQ45 listed on the IDX for the 2017-2019 period. The data used are secondary data. The data analysis method used in this research is Multiple Linear Regression. The results of this study indicate that the Executive Commissioner has an influence on tax avoidance in LQ45 companies listed on the IDX for the 2017-2019 period. Company Size Affects Tax Avoidance at LQ45 Companies Listed on the IDX for the 2017-2019 Period. Independent Commissioner Affects Tax Avoidance at LQ45 Companies Listed on the IDX for the 2017-2019 Period. Institutional Ownership Affects Tax Avoidance in LQ45 Companies Listed on the IDX for the 2017-2019 Period

Keywords: Executive Commissioner, Company Size, Independent Commissioner, Institutional Ownership, Tax Avoidance





Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Komisaris Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 29 LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris Eksekutif Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019. Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019

Kata Kunci : Komisaris Eksekutif , Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional , Tax Avoidance

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan Negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara yang dibayar oleh masyarakat dan pemungutan yang dipaksakan oleh pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan serta beban yang akan mengurangi laba bersih bagi suatu perusahaan. Suatu perusahaan berupaya untuk membayar pajak dengan sekecil-kecilnya karena dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan [1]. Keadaan ini yang menyebabkan perusahaan berupaya mencari cara bagaimana meminimalkan pembayaran beban pajak yang harus dibayar. Untuk meminimalkan beban (kewajiban) pajak yang harus dibayar dapat dilakukan mulai dari yang mengikuti peraturan pajak (lawfull) ataupun yang melanggar peraturan pajak (unlawfull). Meminimalkan beban pajak yang mengikuti peraturan perpajakan disebut juga Penghindaran Pajak atau Tax Avoidance [2].





Penghindaran Pajak merupakan suatu persoalan yang rumit sebab di satu sisi penghindaran pajak dilegalkan atau diperbolehkan apabila mempunyai tujuan-tujuan yang baik namun di satu sisi lainnya penghindaran pajak dianggap illegal apabila melakukannya tindakan transaksi-transaksi yang direkayasa. Tetapi, apabila penghindaran pajak yang tidak boleh disebabkan jika mempunyai tujuan dan tindakan yang dimanipulasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan [3]. Penghindaran Pajak merupakan tindakan yang menggambarkan peraturan hukum bagi wajib pajak sehingga mengurangi kewajiban pajaknya, seringkali digunakan untuk berlangganan penghindaran yang dicapai oleh peraturan yang dibuat untuk kepentingan pribadi atau bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah-celah atau kesempatan yang ada serta kekurangan hukum pajak lainnya. Peraturan yang dirancang untuk melawan penghindaran pajak telah menjadi hal yang biasa dan seringkali melibatkan ketentuan hukum yang sangat kompleks [4] menjelaskan Penghindaran Pajak sebagai suatu tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan pengaturan yang sangat hati-hati untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Didalam tindakan Penghindaran Pajak, wajib pajak tidak secara langsung melanggar peraturan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan hanya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya yang dianggap tidak melawan hukum serta membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak di satu sisi dianggap legal, namun disisi lain dianggap illegal atau tidak diinginkan oleh pemerintah. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development [5] menyebutkan bahwa ada tiga karakteristik yang terdapat pada penghindaran pajak yaitu sebagai berikut : 1. Terdapat unsur artifisial di mana ada pengaturan yang seakan-akan ada di dalamnya namun pada kenyataannya tidak terkandung, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya faktor pajak yang ada. 2. Menerapkan ketentuan-ketentuan yang resmi untuk beberapa macam tujuan, namun sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh pembuat peraturan. 3. Para konsultan pada umumnya menjaga kerahasiaan dengan menunjukkan cara atau alat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak [6].



Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah terjadinya penurunan rasio pajak selama empat tahun terakhir.

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari http://www.pajak.go.id_ mengenai penurunan rasio pajak periode 2014-2017, diketahui bahwa pada tahun 2014 rasio penerimaan pajak sebesar 13,1% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 11,6%. Begitu pula pada tahun 2016 dan 2017 yaitu mengalami penurunan menjadi 10,8% dan 10,7%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dibawah negara-negara lain yang disebabkan dari rendahnya rasio pajak seperti pada tahun 2015 pendapatan pajak dari negara Malaysia sebesar 14,3%, Thailand sebesar 16,5% dan Australia sebesar 22,2%. Rasio pajak menggambarkan angka kepatuhan membayar pajak warga negara. Rendahnya angka Tax Ratio membuktikan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah serta rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat menyebabkan adanya tindakan penghindaran pajak yang cukup tinggi, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Selain adanya tuntutan pembayaran pajak sebagai kewajiban, perusahaan-perusahaan go public diharuskan pula untuk menerapkan Corporate Governance. Corporate Governance yang diterapkan dengan baik dan benar akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang akan mengakibatkan timbulnya masalah pada perusahaan [7]. Corporate Governance mencakup Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komisaris Eksekutif. Corporate Governance yang diterapkan dilatarbelakangi oleh masalah struktur kepemilikan institusional, hal ini dikarenakan dengan adanya kepemilikan institusional maka terdapat pengawasan yang lebih baik. Kepemilikan institusional juga memiliki peran yang penting untuk mengawasi kinerja manajemen agar berjalan dengan baik.

Tingginya suatu kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan kepada manajerial semakin besar sehingga berkurangnya konflik kepentingan manajemen dan investor institusional dapat mengurangi kewajiban dengan mengurangi masalah keagenan sehingga mengurangi tindakan penghindaran pajak [8]. Faktor lainnya adalah komisaris independen. Komisaris independen memiliki fungsi dan tugas untuk melaksanakan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif [9].



Dengan adanya komisaris independen pada perusahaan diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberi pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan dari manajemen perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan [10]. Pemimpin perusahaan yang bersifat risk taker akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pemberian yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat [11]. Untuk meminimalkan pajak juga dapat muncul dari kemampuan perusahaan untuk membayar pajak yang dapat terlihat dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dikelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil menurut berbagai cara, diantaranya total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran Perusahaan (Size) ditunjukkan melalui log total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode [12]. Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya dan menunjukkan kestabilan serta memampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin menjadi perhatian pemerintah serta adanya kecenderungan untuk patuh atau menghindari pajak.

Sudah banyak Penelitian terdahulu yang meneliti tentang Penghindaran Pajak. Penelitian tersebut antara lain yang dilakukan oleh [13] dengan judul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017” menunjukkan hasil bahwa variabel return on asset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



Hasil ketiga, leverage berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hasil keempat, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel size, leverage, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [14] menunjukkan hasil bahwa (1) kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance, (2) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, (3) dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance, (4) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, (5) komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. (6) karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. (7) leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan yang berguna untuk mengetahui hasil temuan yang jika diterapkan pada kondisi lingkungan dan waktu yang berbeda, karena dalam fenomena di atas dan juga penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor Tax Avoidance dengan menggunakan periode waktu dan obyek yang berbeda dari penelitian sebelumnya , sehingga akan memberikan hasil penelitian yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh Pengaruh komisaris eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan untuk melengkapi penelitian terdahulu mengenai tax avoidance yang pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variable komisaris eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional dan tax avoidance.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Komisaris Eksekutif Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019?
2. Apakah Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019?
3. Apakah Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019?





4. Apakah Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder sebagai sumber data [15]. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan tahunan Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019. Penelitian ini menganalisa dan menjelaskan Pengaruh Komisaris Eksekutif , Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019.

Indikator Variabel

Tabel 1. Indikator Variabel

No.	Variabel	Indikator Variabel	Sumber
	Komisaris Eksekutif	EBITDA Total Aset Perusahaan pada tahun t	[13]
	Ukuran Perusahaan	SIZE = Ln (Total Aset)	[2]
	Komisaris Independen	$INDP = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$	[13]
	Kepemilikan Institusional	$INST = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$	[16]
	Tax Avoidance	$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	[16]

Sampel

Perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu atau karakteristik tertentu.

Kriteria dari pemilihan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo periode tahun 2017-2019





2. Perusahaan harus sudah listing pada awal periode pengamatan (2017) dan tidak delisting hingga akhir periode pengamatan (2019)
3. Perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan yang mencantumkan nilai variabel-variabel yang akan diteliti yaitu Komisaris Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Tax Avoidance

Tabel 2
Sampel Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	Adaro Energy Tbk.	ADRO
2	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	ANTM
3	Astra International Tbk.	ASII
4	Astra Agro Lestari Tbk.	AALI
5	Bakrie & Brothers Tbk.	BNBR
6	Bakrie Sumatra Plantations Tbk.	UNSP
7	Barito Pacific Tbk.	BRPT
8	Elnusa Tbk.	ELSA
9	Holcim Indonesia Tbk.	SMCB
10	Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.	INKP
11	Indika Energy Tbk.	INDY
12	Indo Tambangraya Megah Tbk.	ITMG
13	Indocement Tunggal Prakasa Tbk.	INTP
14	Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF
15	Indosat Tbk.	ISAT
16	Internatioanl Nickel Ind. Tbk.	INCO
17	Jasa Marga (Persero) Tbk.	JSMR
18	Kalbe Farma Tbk.	KLBF
19	Lippo Karawaci Tbk.	LPKR
20	Medco Energi International Tbk.	MEDC
21	Perusahaan Gas Negara Tbk.	PGAS
22	PP London Sumatra Indonesia	LSIP
23	Sampoerna Agro Tbk.	SGRO
24	Semen Gresik (Persero) Tbk.	SMGR
25	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.	PTBA
26	Telekomunikasi Indonesia Tbk.	TLKM
27	Timah Tbk.	TINS
28	Unilever Indonesia Tbk.	UNVR
29	United Tractors Tbk.	UNTR





Teknik Analisis Data

- 1) **Statistik Deskriptif**
- 2) **Analisis Regresi Logistik[17]**
- 3) **Pengujian Hipotesis**
1. **Uji t (Uji parsial)[18]**

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Standardized				
	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	24.722	76.999		.321 .749
	Komisaris Eksekutif	1.986	.234	.307 4.213	.000
	Ukuran Perusahaan	4.517	2.538	-.130 3.780	.009
	Komisaris Independen	250.758	26.715	.618 9.386	.000
	Kepemilikan Institusional	58.138	10.044	.391 5.788	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Pada table tersebut mengenai hasil pengolahan SPSS, maka dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 24.722 + 1.986 X_1 + 4.517 X_2 + 250.758 X_3 + 58.138 X_4 + e$$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan bahwa :

- a) Konstanta adalah sebesar 24.722. Hal ini berarti jika tidak dipengaruhi Komisaris Eksekutif, Ukuran Perusahaan , Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional maka besarnya Tax Avoidance sebesar 24.722.
- b) Koefisien variabel Komisaris Eksekutif sebesar 1.986. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan Komisaris Eksekutif sebesar satu satuan maka Tax Avoidance juga mengalami peningkatan sebesar 1.986 dengan asumsi bahwa faktor lainnya adalah konstan atau tetap
- c) Koefisien variabel Ukuran Perusahaan sebesar 4.517. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan Ukuran Perusahaan sebesar satu satuan maka Tax Avoidance juga mengalami peningkatan sebesar 4.517 dengan asumsi bahwa faktor lainnya adalah konstan atau tetap.





- d) Koefisien variabel Komisaris Independen sebesar 250.758. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan Komisaris Independen sebesar satu satuan maka Tax Avoidance juga mengalami peningkatan sebesar 250.758 dengan asumsi bahwa faktor lainnya adalah konstan atau tetap.
- e) Koefisien variabel Kepemilikan Institusional sebesar 58.138. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan Komisaris Eksekutif sebesar satu satuan maka Tax Avoidance juga mengalami peningkatan sebesar 58.138 dengan asumsi bahwa faktor lainnya adalah konstan atau tetap.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 τ

Hasil Uji R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.808 ^a	.654	.637	27.93478	1.989

Pada table diatas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi R adalah 0,808 atau mendekati 1. Artinya terdapat hubungan (korelasi) yang kuat antara variabel bebas yang meliputi Komisaris Eksekutif, Ukuran Perusahaan , Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap variabel terikat yaitu Tax Avoidance. Adapun analisis determinasi berganda, dari tabel diatas diketahui persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai R square adalah 0,654 maka koefisien determinasi berganda $0,654 \times 100\% = 65,4\%$ dan sisanya $100\% - 65,4\% = 34,6\%$. Hal ini berarti naik turunnya variabel terikat yaitu Tax Avoidance dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Komisaris Eksekutif, Ukuran Perusahaan , Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebesar 65,4%. Sedangkan sisanya sebesar 34,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini





b. Uji t (Uji parsial)

Pada uji hipotesis ini menggunakan uji t dipergunakan untuk mengukur tingkat pengaruh signifikansi secara parsial antara variabel independen yang meliputi Komisaris Eksekutif, Ukuran Perusahaan , Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance pada perusahaan LQ45. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (a=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Dengan $df = n - k - 1$, $87 - 4 - 1 = 82$ sehingga diperoleh t tabel (0,05) sebesar 1.66365
Nilai t hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan SPSS versi 23.
Hasil perhitungan SPSS versi 23 mengenai analisis uji t (uji parsial) ditunjukkan oleh table dibawah ini :

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24.722	76.999	.321	.749
	Komisaris Eksekutif	1.986	.234	.307	4.213
	Ukuran Perusahaan	4.517	2.538	-.130	3.780
	Komisaris Independen	250.758	26.715	.618	9.386
	Kepemilikan Institusional	58.138	10.044	.391	5.788

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

1. Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Komisaris Eksekutif terhadap Tax Avoidance menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai t hitung 4.213 dan t tabel 1.66365. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $4.213 > 1.66365$ dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$,sehingga **H1** yang menyatakan bahwa variabel Komisaris Eksekutif secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Tax Avoidance **diterima**.





2. Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009, lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai t hitung 3.780 dan t tabel 1.66365. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3.780 > 1.66365$ dan tingkat signifikan $0,009 < 0,05$, sehingga **H2** yang menyatakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Tax Avoidance **diterima**.
3. Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai t hitung 9.386 dan t tabel 1.66365. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $9.386 > 1.66365$ dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga **H3** yang menyatakan bahwa variabel Komisaris Independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Tax Avoidance **diterima**.
4. Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai t hitung 5.788 dan t tabel 1.66365. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $5.788 > 1.66365$ dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga **H4** yang menyatakan bahwa variabel Kepemilikan Institusional secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Tax Avoidance **diterima**.

Table 6
Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Uraian	Hasil	Keterangan
1	Hipotesis 1 : Pengaruh Komisaris Eksekutif terhadap Tax Avoidance	Diterima 3.780	$4.213 > 1.66365$ $0,000 < 0,05$
2	Hipotesis 2 : Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Diterima 9.386	$3.780 > 1.66365$ $0,009 < 0,05$
3	Hipotesis 3 : Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance	Diterima 5.788	$1.66365 > 1.66365$ $0,000 < 0,05$
4	Hipotesis 4: pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance	Diterima 1.66365	$5.788 > 1.66365$ $0,000 < 0,05$



Pembahasan

1. Komisaris Eksekutif Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019

Pimpinan perusahaan memiliki dua karakter yakni risk taker dan risk averse. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter risk taker akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Selain itu, pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat. Dengan demikian mereka harus mampu mendatangkan cash flow yang tinggi untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan. Sedangkan risk taker, eksekutif yang memiliki karakter risk averse akan cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Hasil penelitian terdahulu [5], [11], [10], dan [19] menunjukkan bahwa komisaris eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah. Biasanya eksekutif risk averse memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan. Dibandingkan dengan risk taker, eksekutif risk averse lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar. Jenis karakter yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan risk taker atau risk averse dapat tercermin pada besar kecilnya resiko perusahaan yang ada. Risiko perusahaan merupakan cermin dari policy yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Jadi, policy yang diambil ini mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter risk taker atau risk averse. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan yang ada, maka pemimpin perusahaan semakin memiliki karakter risk taker yang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm.





Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh [20], [21], [22] dan [23] menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar mengindikasikan bahwa ia telah mencapai tahap kedewasaan yang arus kasnya sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, perusahaan dengan total aktiva besar juga mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil serta lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya kecil. Selain itu, manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

3. Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh [14] menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Dalam hubungan keagenan, pemilik saham sebagai principal menginginkan agar manajer sebagai agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Principal menginginkan agent untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi biaya, termasuk biaya pajak yang timbul dari jumlah pertambahan kekayaan yang dimiliki principal. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen ini dapat menghambat kepentingan pemilik saham karena komisaris independen yang memiliki fungsi pengawasan dan diasumsikan tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik saham akan sebisa mungkin meminimalkan tindakan efisiensi biaya pajak atau penghindaran pajak.





Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, disebutkan bahwa jumlah proporsional komisaris independen didalam sebuah perusahaan yaitu paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin banyak jumlah komisaris independen diharapkan akan memperketat bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan corporate governance karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip corporate governance, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor.

4. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak di luar perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir. Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen yang berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional perusahaan, maka semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh [4], [14], [2], dan [24] menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.



Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi shortterm shareholder institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan longterm shareholder maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang Tax Avoidance yang dipengaruhi oleh Komisaris Eksekutif, Ukuran Perusahaan , Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 23. Data sampel penelitian sebanyak 29 Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2019. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisaris Eksekutif Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019.
2. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019.
3. Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019.
4. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan LQ45 saja sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat di generalisasikan ke perusahaan lain
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel Independen dan 1 variabel dependen
3. Penelitian ini hanya mengambil 3 periode saja dari tahun 2017-2019, dan
4. Penelitian ini hanya menggunakan objek 1 negara yaitu Indonesia





Saran

Adapun saran yang dapat di berikan oleh peneliti untuk penelitian dimasa mendatang adalah

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan mengikuti sertakan industri-industri perbankan, manufaktur, Farmasi, dan sector lainnya , sehingga kesimpulan penelitian lebih dapat digeneralisasi,
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi Tax Avoidance,
3. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang sehingga menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi dan
4. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan objek lebih dari 1 negara

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta yang senantiasa memberi dukungan baik materil maupun do'a dan kasih sayang.
2. Bapak Drs. Nurasik, MM selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Mulyana, S. Mulyati, and I. Umiyati, “PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK,” vol. 4, no. 2, pp. 160–172, 2020.
- [2] N. Shafira, “KARAKTER EKSEKUTIF , PROFITABILITAS , SALES GROWTH SERTA LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018) ARTIKEL ILMIAH Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Pro,” 2020.
- [3] N. W. Triyanti, K. H. Titisari, and R. R. Dewi, “Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance,” vol. 20, no. 1, pp. 113–120, 2020.
- [4] D. F. Astuti, R. R. Dewi, and R. N. Fajri, “Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018,” vol. 4, no. 1, pp. 210–215, 2020.





- [5] I. M. Sukartha, "PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF , KOMITE AUDIT , UKURAN PERUSAHAAN , LEVERAGE DAN SALES GROWTH PADA TAX AVOIDANCE Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Dari uraian," vol. 1, pp. 47–62, 2015.
- [6] Council of Executive Secretaries of Tax Organization, "Organization for Economic Cooperation and Development," 1991.
- [7] A. E. Septiani, K. H. Titisari, and Y. Chomsatu, "Tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak," no. 10, pp. 1–10, 2017.
- [8] K. Alviyani, "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTER EKSEKUTIF, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014) Oleh," pp. 2540–2554, 2014.
- [9] M. R. Aris and S. Rejeki, "PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)," pp. 48–65, 2017.
- [10] M. I. Nugraha, "PERAN LEVERAGE SEBAGAI PEMEDIASI PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF , KOMPENSASI EKSEKUTIF , CAPITAL," vol. 832, no. 2, pp. 301–324, 2019.
- [11] muhammad F. Saputra, D. Rifa, and Novia Rahmawati, "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA," pp. 1–12, 2020.
- [12] O. R. Wolff, "O . R . Wolff ., S . Murni ., P . V . Rate . Analisis Peng ... ANALISIS PENGARUH FIRM SIZE , LOAN TO DEPOSIT RATIO , CAPITAL ADEQUACY RATIO , DAN NON PERFORMING LOAN TERHADAP PROFITABILITAS (RETURN ON ASSET) BANK UMUM SWASTA NASIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI," vol. 7, no. 3, pp. 3788–3797, 2019.
- [13] Susilawati, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Perbankan," Akurasi J. Stud. Akunt. dan Keuang., vol. 2, no. 1, pp. 31–46, 2019.
- [14] A. Feranika, H. Mukhzarudfa, and A. Machfuddin, "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX



- [15] S. Hermawan and Amirullah, Metode Penelitian. 2016.
- [16] L. C. Dewi and Y. W. Nugrahanti, “Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Di Bei Tahun 2011–2013),” Kinerja, vol. 18, no. 1, p. 64, 2017.
- [17] W. Sujarweni, Metodologi penelitian (bisnis & ekonomi). Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- [18] Hermawan dan Amirullah, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan pe. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- [19] A. Oliviana and D. Muid, “Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance,” vol. 8, pp. 1–11, 2019.
- [20] D. Wardhani and Z. A. Adiwijaya, “ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN , INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2017 ANALYZE THE EFFECT OF SIZE FIRM , RETURN ON ASSET (ROA), LEVERAGE , AND INSTITUTI,” no. Idx, pp. 76–97, 2019.
- [21] D. E. Marlinda, K. H. Titisari, and E. Masitoh, “Pengaruh Gcg , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance,” vol. 4, no. 1, pp. 39–47, 2020.
- [22] N. K. Windyasari, F. Harimurti, and Suharno, “PENGARUH STRATEGI BISNIS, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE Natalia,” vol. 15, no. 1, pp. 82–92, 2019.
- [23] I. V. R. Hutapea and V. Herawaty, “PENGARUH MANAJEMEN LABA, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2016 – 2018) Ivan,” pp. 1–10, 2020.
- [24] T. Chasbiandani and S. Ambarwati, “PENGARUH CORPORATION RISK DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,” vol. XVII, no. 2, pp. 115–129, 2019.